

**IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN TERHADAP KETERSEDIAN
OBAT UNTUK PASIEN BPJS DI PUSKESMAS RAWAT INAP
KABUPATEN MERANGIN JAMBI**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh:

SYAFITRI YULIANI
NPM. 210018412025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg.: 002/MH/Kes/81/III-2024

**IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN TERHADAP KETERSEDIAN
OBAT UNTUK PASIEN BPJS DI PUSKESMAS RAWAT INAP
KABUPATEN MERANGIN JAMBI**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh:

SYAFITRI YULIANI
NPM. 210018412025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN TERHADAP KETERSEDIAN
OBAT UNTUK PASIEN BPJS DI PUSKESMAS RAWAT INAP
KABUPATEN MERANGIN JAMBI**

TESIS

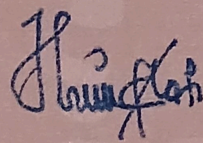
Oleh:

SYAFITRI YULIANI
NPM. 2110018412025

Disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 8 Desember 2023

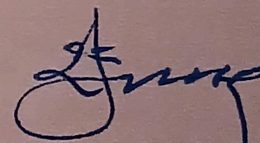
Menyetujui

Pembimbing I



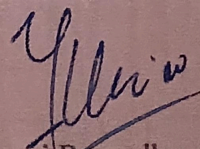
Dr. Maiyestati, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. Zarfinal, S.H., M.H

Ketua Program Studi



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

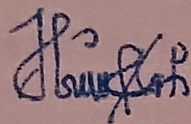
**IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN TERHADAP KETERSEDIAAN
OBAT UNTUK PASIEN BPJS DI PUSKESMAS RAWAT INAP
KABUPATEN MERANGIN JAMBI**

Oleh:
SYAFITRI YULIANI
NPM. 2110018412025

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 8 Desember 2023

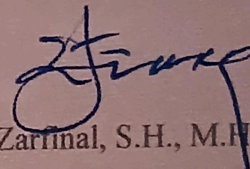
Tim Penguji

Ketua,



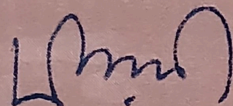
Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

Sekretaris,



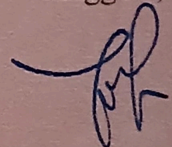
Dr. Zarfimal, S.H., M.H.

Anggota,



Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M. Hum.

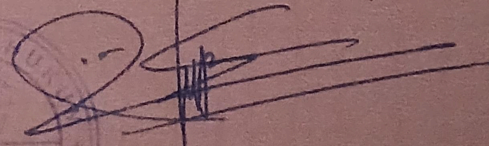
Anggota,



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Pada tanggal 8 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafitri Yuliani

NPM : 2110018412025

Program Studi : Magister Ilmu Hukum Kesehatan

Judul Tesis : IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN
TERHADAP KETERSEDIAAN OBAT UNTUK PASIEN BPJS DI PUSKESMAS
RAWAT INAP KABUPATEN MERANGIN JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 8 desember 2023

Yang membuat pernyataan

(Syafitri Yuliani)

2110018412025

**IMPLEMENTATION HEALTH INSURANCE ON THE AVAILABILITY OF
DRUGS FOR BPJS PATIENTS AT THE INPATIENT HEALTH CENTER
OF MERANGIN JAMBI REGENCY**

Syafitri Yuliani¹, Maiyestati¹, Zarfinal¹

*Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: syafitrisaja85@gmail.com*

ABSTRACT

Implementation Health Insurance that guarantees health promotion, disease prevention, treatment and rehabilitation including BHP. Problem statement: 1. How does Health Insurance affect the availability of drugs for BPJS patients at the inpatient health center in Merangin Regency? 2. What are the obstacles of Merangin Regency inpatient Puskesmas in the availability of drugs for BPJS patients? 3. What are the efforts made by the Merangin Regency Inpatient Health Center in overcoming obstacles in drug availability for BPJS patients? Sociological juridical type of research. The data used are primary data, obtained from interviews. Secondary data are obtained from the study of documents. The collected data is processed and analyzed by qualitative analysis methods. From the results of the study, it was concluded that 1) the Merangin Regency inpatient health center has not been carried out optimally in providing drugs for inpatients participating in BPJS due to the limited number of drugs and drug preparations available at the Merangin Regency inpatient health center. 2) The obstacles faced are the mismatch of the needs and availability of drugs at the Merangin Regency inpatient health center with those provided by the UPTD Pharmacy. Limited APBD funds in drug spending. 3) Efforts are made to overcome these obstacles by submitting an application for drug loan to the UPTD pharmacy Merangin Regency Health Office and replacing injection drugs with tablets. Suggestions 1) add and APBD 2). Making regulations 3). BPJS supervises.

Keywords: Puskesmas, Inpatient, BPJS participants

**IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN TERHADAP KETERSEDIAAN
OBAT UNTUK PASIEN BPJS DI PUSKESMAS RAWAT INAP
KABUPATEN MERANGIN JAMBI**

Syafitri Yuliani¹, Maiyestati¹, Zarfinal¹

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: syafitrisaja85@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Jaminan Kesehatan yang menjamin promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi termasuk BHP. Rumusan masalah: 1. Bagaimana Jaminan Kesehatan terhadap ketersediaan obat untuk pasien BPJS di Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin? 2. Apa saja kendala Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin dalam ketersediaan obat pasien BPJS? 3. Apa upaya yang dilakukan oleh Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin dalam mengatasi kendala dalam ketersediaan obat untuk pasien BPJS? Jenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh dari wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan 1) Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin belum terlaksana secara optimal dalam penyediaan obat untuk pasien rawat inap peserta BPJS dikarenakan terbatasnya jumlah obat dan sediaan obat yang tersedia di Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin. 2) Kendala yang dihadapi yaitu ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan obat di Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin dengan yang diberikan oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Merangin. Keterbatasan dana APBD dalam pembelanjaan obat. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan mengajukan permohonan peminjaman obat kepada UPTD farmasi Dinas Kesehatan dan penggantian obat injeksi dengan obat tablet. Saran 1) menambah dan APBD 2). Membuat regulasi 3). BPJS melakukan pengawasan.

Kata Kunci: Puskesmas, Rawat Inap, peserta BPJS

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan selawat beserta salam bagi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis yang berjudul” **Implementasi Jaminan Kesehatan terhadap ketersediaan obat untuk pasien BPJS di Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin Jambi**”. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.Hum dan ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku penguji Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan perbaikan demi kesempurnaan Tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
6. Jajaran manajemen dan jajaran fungsional tenaga kesehatan Puskesmas rawat inap Puskesmas Muara Jernih, Puskesmas Rantau Panjang dan Puskesmas Sumber Agung Kabupaten Merangin yang telah memberikan informasi dan membantu selama proses penelitian.
7. Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan, Ibu Wanti yang telah memberikan informasi dan membantu selama proses penelitian.
8. Kepala BPJS Cabang Merangin, Bapak Zirmen memberikan informasi dan membantu selama proses penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Angkatan 2022 yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
10. Kedua orang tua, Papa Syahwir dan Mama Sri rezeki serta kedua mertua papa Fahdiral dan mama Hayani atas limpahan doa, kasih sayang dan redho kepada penulis.
11. Suami tercinta Burlian serta anak-anak tersayang Arshaka Hafeezy Gibran, Arsila Ghania Zaereen, dan Aisyah Shaquena Zareen untuk semua doa,

dukungan dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum kesehatan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

Padang, 8 Desember 2023

Syafitri Yuliani
NPM. 2110018412025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Puskesmas di Kabupaten Merangin.....	4
Tabel 1. 2 Rawat inap di Kabupaten Merangin.....	4
Tabel 1.3 Puskesmas rawat jalan di Kabupaten Merangin	5
Tabel 3.4 Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin.....	59
Tabel 3.5 Jumlah pasien BPJS rawat inap Bulan Januari – Agustus 2023.....	60
Tabel 3.6 Penyakit terbanyak Bulan Januari – Agustus 2023.....	60
Tabel 3.7 Daftar obat berdasarkan Formularium Nasional untuk Faskes_I.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.....	58
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Dokumentasi dengan Kepala BPJS Cabang Kabupaten Merangin |
| Lampiran 2 | Dokumentasi dengan Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan |
| Lampiran 3 | Dokumentasi dengan Kepala Puskesmas Muara Jernih Cabang Kabupaten Merangin |
| Lampiran 4 | Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Puskesmas Rantau Panjang |
| Lampiran 5 | Gudang obat Rantau Panjang |
| Lampiran 6 | Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Tata Usaha Puskesmas Sumber Agung |
| Lampiran 7 | Lampiran Daftar Obat Formularium Nasional Faskes I |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, dipenuhi, dijaga dan dilindungi untuk mencapai kesejahteraan. Kesehatan juga merupakan hak dasar yang diakui sebagai manusia, tanpa kesehatan yang memadai seseorang perlu memiliki hak-hak lain, seperti hak untuk hidup, pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak untuk berada dalam masyarakat, mengumpulkan dan mempublikasikan pendapat. Negara juga menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin atas perumahan dan atas lingkungan yang baik dan sehat serta atas pelayanan kesehatan”.

Pasal 34 Ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu juga menyebutkan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara juga berkewajiban menjamin kesehatan warga negaranya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia mempunyai komitmen mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya melalui badan penyelenggara Jaminan Kesehatan yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan